

AKTIVIS PEREMPUAN PEJUANG HAK ASASI MANUSIA (HAM) DARI ACEH: BIOGRAFI SURAIYA KAMARUZZAMAN (1968-2022)

*Pipit Fitriyanah¹, Mawardi²

^{1,2}Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111 Indonesia

ABSTRACK

This research is entitled "Women Fighting for Human Rights (HAM) from Aceh: Biography of Suraiya Kamaruzzaman (1968-2022)", while the objectives of this research are; explained the background of Suraiya Kamaruzzaman's life from early childhood to adulthood as well as her educational history, explained the factors that influenced her to become a human rights activist, and explained her work as a women's human rights activist. This study uses a qualitative approach with historical research methods. The data collection techniques were carried out by means of interviews, documentation, and literature studies. The sources used include primary and secondary sources. Based on the results of the study, it can be seen that Suraiya Kamaruzzaman's becoming a women's human rights activist cannot be separated from the support of family and relatives to help women victims of the conflict in Aceh. which encouraged Suraiya Kamaruzzaman to become a women's human rights activist against the background of the unstable social, cultural, and political conditions in Aceh due to the conflict between the Free Aceh Movement (GAM) and the Tsunami disaster, Suraiya also took postgraduate education in the Department of Social Human Rights at Hong Kong University. science increasingly supports Suraiya as a human rights activist. Her career as an activist began with her role in the establishment of Flower Aceh and Balai Syura Uerung Inong Aceh (BSUIA) institutions that focus on empowering women and providing advocacy assistance to communities in need, making Suraiya Kamaruzzaman obtain achievements and awards as an inspiring women activist from Aceh. and deserve to be role models.

Keyword: Biography, Suraiya Kamaruzzaman

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Perempuan Pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dari Aceh: Biografi Suraiya Kamaruzzaman (1968-2022)", adapun tujuan dalam penelitian ini adalah; menjelaskan latar belakang kehidupan Suraiya Kamaruzzaman sejak dini hingga dewasa serta riwayat pendidikannya, menjelaskan faktor yang mempengaruhi ia menjadi aktivis HAM, dan menjelaskan kiprahnya sebagai aktivis perempuan HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi sumber primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui Suraiya Kamaruzzaman terjun menjadi aktivis perempuan HAM tidak lepas dari dukungan keluarga dan kerabat untuk membantu perempuan korban konflik di Aceh, semangat keberanian Suraiya selama menjadi aktivis diwariskan dari nama besar kakeknya sebagai ulama kharismatik Aceh dengan julukan Abu Lam U. Faktor yang mendorong Suraiya Kamaruzzaman menjadi aktivis perempuan HAM di latar belakang oleh kondisi sosial, budaya, dan politik Aceh yang tidak stabil akibat konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan bencana Tsunami, Suraiya juga menempuh pendidikan pascasarjana Jurusan *Social Human Right* di *Hongkong University* sehingga secara bidang keilmuan semakin mendukung Suraiya sebagai aktivis HAM. Kiprahnya sebagai aktivis diawali dengan adanya peran dalam pendirian *Flower Aceh* dan Balai Syura Uerung Inong Aceh (BSUIA) lembaga yang berfokus pada pemberdayaan perempuan serta memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat yang membutuhkan, membuat Suraiya Kamaruzzaman memperoleh prestasi dan penghargaan sebagai aktivis perempuan yang inspiratif dari Aceh dan pantas menjadi suri tauladan.

Kata Kunci: Biografi, Suraiya Kamaruzzaman

PENDAHULUAN

Dalam upaya memberikan gambaran tentang riwayat hidup seseorang yang memiliki pengaruh baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, keagamaan dan lainnya, biografi penting dan diperlukan untuk peninggalan sejarah tokoh tersebut. biografi merupakan riwayat hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain saat sang tokoh masih hidup ataupun sudah wafat (Daud, 2013).

Suraiya Kamaruzzaman merupakan salah satu aktivis penerima penghargaan Yap Thiam Hien Pada tahun 2001, atas jasa dalam membela HAM serta pemberdayaan perempuan di Aceh. Kiprahnya sudah di mulai sejak ia duduk dibangku kuliah dalam menegakan hak asasi manusia, ia menjadi *steering comitte* pada kongres *Duek Pakat Inong* atau “duduk bersama perempuan” yang pertama di Aceh pada tahun 2000 dengan dihadiri oleh 437 perempuan dari berbagai kalangan berasal dari berbagai kabupaten/kota. Setelah kongres berakhir Suraiya dan ketiga perempuan Aceh lainnya yaitu: Naimah Hasan, Debra Yatim, dan Lutfi Baria menghadap presiden Indonesia Abdurrahman Wahid, untuk melakukan negosiasi penyelesaian konflik di Aceh dengan cara penyelesaian menggunakan musyawarah damai tanpa gencatan senjata.

Selama konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berlangsung. Suraiya aktif memperjuangkan kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan di Aceh sampai skala nasional dengan menyuarakan aspirasinya dikancah internasional hingga mengikuti sidang-sidang PBB di Jenewa, Swiss untuk meminta dukungan negara-negara di dunia untuk mendorong pemerintah Indonesia untuk mengentikan DOM dan melakukan dialog damai (Nayadini. 2017).

Berkat kerja kerasnya memperjuangkan isu-isu perempuan membuatnya memperoleh berbagai penghargaan nasional maupun internasional seperti penghargaan N-PEACE pada acara anugerah perdamaian yang disponsori oleh Badan PBB, *United Nation Development* (UNDP) di Manila, Filipina yang menjadi perwakilan aktivis wanita dari Indonesia pada tahun 2012 (Detik. 2012). Baru-baru ini pada 25 Desember 2021 ia berhasil memperoleh

penghargaan dari Australian Aceh Award (AAA) kategori Penghargaan Dampak Sosial (Hamdani. 2021).

Perlunya mengangkat biografi Suraiya Kamaruzzaman sebagai aktivis perempuan HAM karena kontribusinya pada peristiwa penting yang terjadi dan memiliki nilai sosial yang berguna untuk masa yang akan datang, sehingga nama Suraiya layak ditulis dalam biografi agar perjuangan dan kerja kerasnya dapat dikenang oleh masyarakat Aceh bahwa ada sosok perempuan hebat yang berjuang menegakan HAM di masa kini. Suraiya Kamaruzzaman sebagai aktivis perempuan pemberani yang siap pasang badan di garis terdepan terutama untuk memperjuangkan HAM sangat menarik ia berhasil menempatkan dirinya menjadi perempuan tangguh dalam menegakan HAM di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang kehidupan, faktor dan kiprah Suraiya Kamaruzzaman sebagai tokoh perempuan pejuang HAM (1968-2022). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian historis, dimana penelitian historis meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau, dan menggunakan pendekatan kualitatif, karena pada metode kualitatif dapat menghasilkan sebuah hasil penelitian yang tidak dapat dicapai dengan proses pengukuran statistik, penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau *partisipan* dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas (Creswell dalam Semiawan, 2010).

Pada metode sejarah adanya pengumpulan sumber yang dijadikan sebagai sumber sejarah, terdapat dua jenis data, yaitu data yang bersifat primer dan data sekunder. Adapun sumber data adalah suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, serta memperinci daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi dari sebuah buku atau karya ilmiah atau mengklasifikasikan serta merawat catatan-catatan. Pada tahap ini tahap pengumpulan data-data serta sumber-sumber terkait dari buku,

jurnal, dokumen, serta sumber lainnya (Suparman, dkk. 2020).

Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif (Rachmawati, 2007). Dokumentasi juga digunakan dalam pengumpulan sumber. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen terkait tokoh baik itu dalam bentuk karya ataupun arsip yang memuat tentang riwayat hidupnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian pustaka dalam melakukan sumber dan data yang bertujuan agar dapat mengumpulkan dan memperoleh data serta informasi dengan berbagai macam material yang dapat membantu seperti buku-buku, dokumen, arsip, catatan, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

Dalam penelitian sejarah teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan verifikasi atau kritik sumber, verifikasi terbagi menjadi dua macam: otentisitas (keaslian) sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas (dapat dipercaya) atau kritik ekstern (Kuntowijoyo, 1995). Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya ialah tahap interpretasi atau penafsiran, tahap ini merupakan kegiatan atau tahapan yang menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna serta saling berhubungan dari pada fakta-fakta yang diperoleh (Herlina, 2020). Untuk memenuhi tahap akhir dari metode sejarah ialah tahap historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Keluarga Suraiya Kamaruzzaman

Suraiya Kamaruzzaman lahir dari keluarga yang sama-sama berasal dari Aceh Besar dari pasangan Kamaruzzaman dan Shafatuddin. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai guru, sang ibu adalah seorang guru di MI Negeri Lamjampok, sedangkan ayahnya guru di SD Negeri Seuneulop. Selain berprofesi sebagai guru, orang tua Suraiya juga memiliki lahan pertanian sebagai sumber ekonomi pendukung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Suraiya merupakan anak ke lima dari delapan bersaudara, Syamsul Rizal, Susanna, Sriyani, Fitriana, Suraiya, Fadil, Rayyana, dan satu orang diantaranya meninggal pada saat

masih bayi. Sewaktu kecil Suraiya dan ke tujuh saudaranya sering menghabiskan waktu bermain kolam kecil yang dibuat ayahnya di area pojokan sawah dengan menambahkan batang-batang bambu sebagai tempat berkumpulnya ikan-ikan, keong di persawahan yang dimiliki keluarganya di desa Lam U, kecamatan Montasik saat ini (Ingin Jaya), kabupaten Aceh Besar (wawancara, Suraiya 13 Juli 2022).

Kakek dari ibunya yang merupakan salah seorang ulama Aceh tersohor bernama Teungku Abdullah dikenal juga dengan julukan Abu Lam U, nama Abu Lam U itu sendiri diambil dari nama sebuah kampung yang bernama Lam U. Abu Lam U memiliki saudara yang sama tersohornya yaitu Abu Indrapuri, Abu Niron, dan satu orang lainnya yang berada di Penang Malaysia. Saat Suraiya lahir kakeknya sudah meninggal dunia dan ia mengetahui nama besar kakeknya di dalam buku ensiklopedia dimana nama Abu Lam U banyak dikenal oleh masyarakat dan keluarga besarnya. Pesantren modern Abu Lam U kemudian didirikan oleh adik nenek Suraiya yang ia panggil dengan panggilan Abucek Atailah dengan sistem pendidikan pagi dan siang santri bersekolah, kemudian siang sampai sore santri mengaji di pesantren (Kupipedia. 2021).

Ayah Suraiya merupakan orang yang terlibat penuh dalam usaha pembebasan tanah bersama adik neneknya dan ibu Suraiya pernah menjadi sukarelawan kepala pesantren putri karena bersebelahan dengan lokasi rumah. Bahkan rumah ibu Suraiya pernah dijadikan asrama putri dan dapur rumahnya dijadikan sebagai dapur umum karena pada saat awal pendirian pesantren masih minim anggaran dan keterbatasan biaya. Di pelataran rumah ibu Suraiya terdapat balai milik keluarga bernama balai Abu Lam U seberang jalan di depan balai terdapat tanah kosong yang dijadikan sebagai kuburan keluarga Abu Lam U saat ini lokasi tersebut digunakan untuk pengembangan pesantren.

Suraiya dibesarkan dalam lingkungan keagamaan dari keluarga yang memberikan suri tauladan dari ayah dan ibunya. Orang tuanya membesarkan ke tujuh anaknya dengan membiasakan bertanggung jawab sedari kecil seperti siapapun yang pulang sekolah lebih dulu

maka diharuskan memasak nasi, dan kegiatan memasak nasi dengan jadwal giliran siapa yang cepat pulang itupun tertanam dan dibiasakan tanpa harus saling tunggu menunggu memulainya. Kebiasaan tersebut sebenarnya tidak ditekankan oleh kedua orang tuanya hanya saja keseluruhan anaknya saling menyadari satu sama lain tentang tanggung jawabnya terutama bagi anak tertua yang harus mengamong adik-adiknya (wawancara, Fitriana 27 Juni 2022).

Orang tua Suraiya merupakan sosok yang berprinsip dan mendukung anak-anaknya untuk menempuh pendidikan, seluruh anaknya diberikan dukungan untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan pilihan dan kemaunnya, ke tujuh anaknya merasakan bangku sekolah dengan baik bahkan enam diantaranya berhasil melanjutkan pendidikan Sarjana, hanya abang tertua saja yang menamatkan pendidikannya sampai ke jenjang SMA. Namun, untuk masa tersebut seseorang yang menyelesaikan pendidikan SMA tergolong orang yang mengenyam pendidikan yang cukup tinggi (wawancara, Fitriana 27 Juni 2022).

Riwayat Pendidikan Suraiya Kamaruzzaman

Suraiya Kamaruzzaman lahir di Aceh Besar, 3 Juni 1968 nama “Kamaruzzaman” merupakan nama dari ayahnya yang ia sematkan setelah ayahnya wafat pada saat ia menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. ia memiliki nama panggilan sewaktu kecil dengan panggilan “Dek Su”, dan dikalangan aktivis saat ini ia populer dengan panggilan “Kak Aya”. Suraiya menempuh pendidikan sekolah dasar di MIN Lamjampok, Aceh Besar sampai selesai pada 1981, kemudian ia melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 6 Banda Aceh dan lulus pada 1984, dan ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Banda Aceh, pada saat menempuh pendidikan menengah atas ia tidak aktif berkecimpung di organisasi sekolah akibat jarak sekolah dan rumahnya yang jauh sehingga waktu yang ia habiskan banyak diperjalanan, ia juga mengalami sedikit hambatan dalam memahami pelajaran untuk mengimbangi rekan sekelas lainnya (wawancara, Suraiya 13 Juli 2022).

Pada saat melanjutkan pendidikan sarjana Suraiya sempat diberikan saran dari orang

tuanya untuk memilih keguruan karena latar belakang orang tuanya yang merupakan seorang guru, kakak-kakak perempuannya berkuliah bahkan menjadi dosen di FKIP Universitas Syiah Kuala dengan Jurusan Kimia, Fisika, PKK sehingga ia diberikan saran agar maneruskan ke Pendidikan Matematika agar menjadi guru. Namun pada saat itu Suraiya menyeletuk dia akan masuk FKIP apabila orang tuanya membangun sekolah sendiri kalau tidak ia tidak mau, melihat anaknya tidak tertarik dengan saran tersebut akhirnya ayah Suraiya memberikan kebebasan untuk putrinya melanjutkan di jurusan sesuai kemauan. Suraiya memilih jurusan Teknik Kimia hingga pada tahun 1994 ia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia Universitas Syiah Kuala dan bekerja sebagai pendidik di Jurusan tempat ia berkuliah, ia tidak menyangka bahwa takdir membawanya menjadi seorang guru sesuai keinginan orang tuanya (wawancara, Suraiya 13 Juli 2022).

Semasa kuliah dalam lingkungan pertemanan, Suraiya merupakan sosok yang perhatian, baik, dan suka menolong ia selalu membawa energi positif bagi orang-orang terdekatnya, maka tidak heran siapapun yang berdekatan dengannya bersemangat, tutur katanya sangat baik dan lugas, ia perempuan yang cerdas dalam berperilaku serta berkomunikasi sosial. Suraiya dapat menyelesaikan masalah secara terbuka dan saling mengingatkan satu sama lain jika ada hal-hal yang mengganjal, (wawancara, Khairani 8 Juni 2022).

Tahun 2003 ia melanjutkan program pascasarjana di Fakultas Hukum, Bidang Hak Asasi Manusia, *University of Hongkong* alasan mengapa akhirnya Suraiya tertarik dengan melanjutkan pendidikan diluar spesifikasinya pada saat sarjana selain belum adanya peraturan tentang jenjang pendidikan harus linear. Pada saat itu, juga karena ia banyak bekerja pada isu-isu HAM sejak duduk di bangku kuliah serta pernah beberapa kali ikut dalam sidang-sidang PBB, sejak tahun 2001 ia sudah ditawarkan beasiswa ke Hongkong tentang hukum *Human Right* oleh *Asia Foundation* namun kondisi *Flower Aceh* pada saat itu tidak memungkinkan dan teman-temannya di *Flower Aceh* belum siap untuk ditinggalkan Suraiya karena perang dan

konflik yang semakin parah, kemudian pada 2002 *Asia Foundation* menawarkan kembali beasiswa tersebut dengan memberikan les bahasa Inggris di Australia untuk persiapan pendidikan pascasarjananya.

Suraiya kemudian menyetujui untuk mengambil beasiswa S2 di Hongkong karena kondisi konflik saat itu sudah mulai kondusif karena adanya pertolongan jeda kemanusiaan dari Henry Dunand *Center* dan keluarga, teman-teman *Flower* serta prodi Jurusan Teknik Kimia mendukung demi keamanan dan kenyamanan Suraiya, karena pada saat itu namanya termasuk dalam daftar orang yang ditembak di tempat. Enam bulan di Hongkong Suraiya mendengar bahwa kondisi Aceh kembali memanas dengan adanya darurat sipil sehingga selama sekolah ia membantu menggalang dana bersama teman-temannya yang kemudian secara diam-diam ia kirimkan ke Flower Aceh untuk membantu para aktivis yang terancam agar keluar dari Aceh (wawancara, Suraiya 13 Juli 2022).

Latar Belakang Sosial, Budaya, dan Politik Aceh

Penduduk Aceh dibagi menjadi penduduk pegunungan sebelum melayu pertama, Gayo dan Alas, serta penduduk pesisir pantai yang merupakan hasil dari perkawinan selama berabad-abad dari perkawinan antara Batak, Dravidana, India Selatan, Jawa, Arab, Cina serta Minangkabau.

Budaya di Aceh tentunya tidak lepas dengan asal muasal penyebutan nama Aceh itu sendiri belum diketahui secara pasti. Orang Aceh biasa menyebut dirinya dengan *ureung Aceh* yang bermakna “orang Aceh”. Informasi tersebut didapat dari dongeng, mitos ataupun laporan perjalanan para musafir dan pedagang. Ada yang menyatakan juga arti Aceh ialah A berarti Arab, C berarti Campa, E berarti eropa, dan H berarti Hindia atau Hindu. Pernyataan latar belakang arti Aceh ini dapat dilihat dari masyarakat Aceh Besar, mereka banyak menyerupai orang Arab dan memiliki gelar Sayid ataupun Syarifah, di bagian Lamno wajahnya menyerupai orang Portugis, sedangkan di daerah Sigli dan Lhokseumawe menyerupai orang India. Dan

menurut Hurgronje sebagian orang Aceh berasal dari Campa, dan bahasa Aceh memiliki kemiripan dengan bahasa Campa (Sufi, dkk. 1998).

Aceh juga dikenal dengan syariat islamnya. Oleh karena itu, syariat Islam bukanlah narasi baru di Aceh. Akan tetapi, terdapat interpretasi baru hukum syariat yang cenderung mendiskriminasikan perempuan. Suraiya mengemukakan:

sangat yakin bahwa ini bukanlah agenda dalam catatan Perdamaian Helsinki, membuat dengan tegas *freedom for religion*, bukan syariat Islam. Suraiya menemukan satu pasal yang dapat disalah artikan berbunyi sebagai berikut:

“Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini di Aceh”

(Suraiya dalam Indraswari dan Kholifah. 2016).

Kultur masyarakat Aceh kontemporer, tak lagi berorientasi religi sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah Hikayat Malam Dewa. Sesuai dengan perkembangan teknologi, perubahan nilai telah berlangsung dengan cepat di daerah ini. Masa silam rakyat aceh yang terkenal lugu, jujur, serta penuh ketakwaan kepada Allah SWT telah mengalami pengunduran menjadi masyarakat yang individualistis dan materialistis.

Pada akhirnya proses sekulerisasi rakyat Aceh berjalan dengan mulusnya, kemudian saat itu juga mulai pudarnya tatanan sosial budaya lokal yang ketika masa lalu masih sangat kental dengan tradisi islam. Pergeseran kultur ini di sebabkan oleh agresifnya politisasi pemerintah era Orde Baru kepada para ulama Aceh yang berpengaruh pada lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren. Realistis dibuktikan oleh gejala bahwa puluhan ribu generasi muda Aceh tidak lagi menuntut ilmu di pesantren-pesantren daerah. Akan tetapi, mereka berbondong-bondong memilih belajar agama diluar daerahnya (Murni, dkk. 2018).

Beriringan dengan bergesernya nilai religius masyarakat Aceh secara sistematis, gaya berbusana masyarakat tempo dulu juga berubah.

tempat-tempat hiburan juga mulai tersebar di kabupaten/kota di Aceh, alhasil Aceh kontemporer mulai redup dan modernisasi diciptakan melalui “pembangunan” Orde Baru. Kemerosotan moral menjadi hal yang biasa bagi aparat dan oknum-oknum pemerintah, jika ada kritik sosial yang datang dari ulama adalah sebagai angin lalu yang tidak akan terdengar hati kecil penguasa.

Sejarah membuktikan bahwa diakhir tahun 1940-an, masyarakat Aceh memberi bantuan material ke pemerintah pusat yang baru ketika digabungkan menjadi Republik Indonesia dengan menyumbangkan emas pribadi mereka untuk pesawat pertama nasional Indonesia. Akan tetapi, menjadi bagian dari sebuah Negara post-kolonial yang dikekang dengan otonomi *de facto* dimana perekonomian diatur secara sentralistik dari Jakarta. Akibat dari ketidakadilan dalam satu dasawarsa tersebut memunculkan ketidakpuasan yang serius. Ada beberapa dinamika lingkaran klasik pada saat itu (keputusan dibuat di Jakarta, perpajakan dibuat di Jakarta, dan perjanjian politik dibentuk di Jakarta) kekhawatiran terhadap aturan islam yang akan hilang, elit lokal dan khususnya, ulama islam Aceh yang berpengaruh mendukung pemberontakan bersenjata dari tahun 1953-1960 (Aguswandi dan Large. 2008).

Pergeseran nilai juga terjadi pada orientasi politik masyarakat Aceh tempo dulu akibat orang-orang yang cinta demokrasi. Terdapat tiga etnik dengan bentuk pemerintahan tradisional yang merupakan satu dari cikal bakal demokrasi di Indonesia. Kesultanan Aceh dengan sistem pemerintahan federasi, menunjukkan ciri khas demokrasi yang telah lama berlangsung di Aceh.

Timbulnya proses yang berlawanan arah dengan prinsip demokrasi dengan budaya politik di Aceh tak terlepas dari diberikannya peranan ekonomi yang lebih besar dalam pemerintahan di Aceh. Sehingga seolah-olah pemerintahan itu dikelola dengan sistem manajemen perusahaan. Konsekuensinya orientasi pejabat untuk mengambil keuntungan dan menjadikan pengelolaan bisnis. Elite penentu di Aceh tidak lagi terletak pada birokrasi, tetapi bergeser kepada pengusaha. Keseluruhan proses

kehidupan politik membuat rakyat Aceh menjadi teralienasi dengan pemerintah dan ulama, sehingga rakyat Aceh asing di negerinya sendiri (Murni, dkk. 2018).

Berbagai ketentuan untuk menciptakan institusi-institusi untuk mengenalkan dan menegakan hukum Islam gagal untuk diwujudkan dan peraturan pengadilan Islam menjadi sangat terbatas di bawah Orde Baru. Sampai 1974, ketika Orde Baru mengeluarkan UU No. 5/1974 tentang Prinsip-prinsip Administrasi Pemerintahan Daerah, formula “Daerah Istimewa” Aceh telah sama sekali tidak sesuai dengan artinya. Undang-undang ini jauh lebih meningkatkan kedudukan Jakarta atas administrasi daerah dengan membentuk kontrol dimana sistem pemerintahan eksekutif dipilih melalui pemilu terpisah dengan kekuasaan legislatif dan di Aceh penunjukan gubernur serta tanggung jawab gubernur dalam mengelola pemerintahan provinsi (Aguswandi dan Large. 2008).

Kemunculan GAM tercipta akibat persinggungan antara rakyat Aceh dengan pemerintah Orde Baru. Secara pengamatan situasi dan kondisi Aceh selama terlibat dalam program “pembangunan” Orde Baru, ternyata selama itu pemerintah pusat memperlakukan rakyat Aceh seperti tumbuhan bonsai, yang berarti boleh tumbuh tapi tidak boleh besar. orang-orang Jawa dan Batak secara kebetulan menjadi “gunting” dalam membentuk tanaman bonsai itu. Kesempatan berharga justru diprioritaskan kepada calon-calon pencari kerja dari luar aceh. Kondisi ketidakadilan ini dengan serta-merta menyergap rakyat Aceh yang masih hidup dalam kelompok-kelompok masih alami dan agraris. Kebesaran industri-industri raksasa muncul dihadapan rakyat Aceh yang miskin. Mereka mendapati dirinya sedang berdampak secara sistematis akibat roda-roda pembangunan Orde Baru (Murni, dkk. 2018).

Pada penghujung tahun 2004 terjadi gempa dan tsunami di Aceh yang menimbulkan banyak korban meninggal dan menambah banyak persoalan. Sampai program respon emergensi, pembakaran, rehabilitasi/rekontruksi Aceh menjadi pusat perhatian hampir setengah anggota PBB, yang pada akhirnya berakibat perempuan

menjadi korban, perempuan menjadi alat berbagai kepentingan, perempuan dipinggirkan, diabaikan kepentingan dan kebutuhan. Bahkan sehubungan bencana tsunami ada suara-suara yang menyatakan “semua ini terjadi karena cobaan serta pelajaran Allah karena perempuan sebagai kaum yang banyak membuat dosa dan tidak menta’ati Syari’at islam secara sempurna”, padahal dalam keadaan suka ataupun tidak suka perempuan berperan sebagai tulang punggung untuk menjalankan kehidupan keluarga dan sosial (Sofyan, dkk. 2008).

Dengan adanya polemik konflik yang terjadi berkepanjang di tambah peristiwa bencana tsunami Aceh menyebabkan guncangan sosial di masyarakat yang bertubi-tubi. Namun, dengan adanya peristiwa tsunami menjadi pembelajaran tersendiri bagi Suraiya dan masyarakat Aceh dimana perdamaian akhirnya di dapatkan tidak ada lagi suara tembakan senjata. Masyarakat dapat memperoleh kebebasan dalam beraktivitas tanpa khawatir adanya DOM baik dari TNI atau GAM, lembar baru masyarakat Aceh terbentang. Perjanjian perdamaian telah ditanda tangani oleh perwakilan GAM dan pemerintah Indonesia secara resmi pada 25 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia (Indraswari dan Kholifah. 2016).

Karier dan Prestasi Suraiya Kamaruzzaman

Sejak 1998 Suraiya Kamaruzzaman bekerja sebagai dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia di Universitas Syiah Kuala dengan mata kuliah yang diampunya antara lain; Kimia Organik 1, Kimia Organik 2, *Teknopreuner, Communication Skill*, Keamanan dan Keselamatan Kerja, Kebencanaan dan Perubahan Iklim, Pratikum Analisa Bahan Kimia Fisika dan Operasi Teknik Kimia (OTK), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Suraiya sudah berkarir sejak ia menjadi mahasiswa di jurusan Teknik Kimia Universitas Syiah Kuala. Meskipun menempuh pendidikan sarjana pada jurusan teknik spesifikasi keahlian Suraiya berfokus pada *gender* dan *human right* serta *peace building*, perencanaan dan pelaksanaan monitoring program berspektif gender, penguatan institusi untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, advokasi kebijakan dan *legal drafting* berspektif

gender, gender dan lingkungan, *public speaking* dan *leadership* perempuan, hak dan kesehatan reproduksi perempuan, pengembangan ekonomi kreatif (*one village one product*) (Kamaruzzaman. 2019).

Pada 1990-1992 ia menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia (HIMTEK), kemudian ia aktif mengkampanyekan Hak Asasi Manusia khususnya pada pemberdayaan perempuan korban konflik sejak duduk di bangku kuliah, dimana nasib perempuan pada masa konflik banyak mengalami diskriminasi dan kekerasan serta pelecehan seksual.

Ia mendirikan Flower Aceh pada 1989 dan menjabat sebagai direktur pelaksana sejak 1995-2002, pada 2002-2009 ia terpilih sebagai ketua dewan pengurus Flower Aceh. Kemudian pada 1995 ia mendirikan organisasi Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) dan menjadi ketua dewan pengurus, pada 1996 ia bergabung dengan organisasi Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP) di Jakarta, kemudian pada 2001 ia terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas Nasional (DPN) dan pada 2004-2008 ia menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas Nasional (DPN) Perserikatan Solidaritas Perempuan (Kamaruzzaman. 2019).

Pada 1995-2001 ia menjadi dewan pengurus Jaringan Informasi dan Pemberdayaan Rakyat (Suloh), dan mendirikan organisasi Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) pada juni 2000 dengan riwayat jabatan sebagai kordinator pelaksana, dewan pengurus, serta ketua dewan pengurus sampai tahun 2011.

Kemudian pada tahun 2000 ia mendirikan Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) pendirian tersebut hasil dari “*Duek Pakat Ureung Inong Aceh*” (DPIA I) selain menjadi pendiri ia juga menjabat sebagai Majelis Advokasi dan Kebijakan pada 2005-2010 dan Presidium bagian pemenuhan hak korban pada 2011-2017 serta Presidium bidang advokasi sejak 2017-2022, di tahun 2002 ia bergabung dengan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang berpusat di Jakarta, ia berhasil menjabat sebagai anggota dewan pengurus periode 2010-2011 dan ketua dewan pengurus periode 2014-2019. Karirnya terus merambat di

berbagai bidang salah satunya ia bergabung pada Komunitas Radio Suara Perempuan pada 2005-2008 dan menjabat sebagai ketua badan pengurus. Pasca tsunami ia sempat non aktif sebagai dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia untuk mengurus yayasan yang dimiliki keluarganya yaitu yayasan Abu Lam'u dimana pada saat itu ia bertugas sebagai direktur pelaksana sejak 2005-2010 dan ketua I badan pengurus pada 2011-2016, dan di tahun 2005 ia juga menjabat sebagai ketua badan pengurus di *The Facilitator Associate Inspiration for Managing People's Action (IMPACT)* hingga tahun 2009.

sejak 2006-2010 ia bergabung dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Syiah Kuala dan menjadi kordinator divisi hak sipil dan politik, kemudian pada 2011-2014 ia menjabat sebagai kordinator devisi jaringan dan sejak 2014 sampai sekarang ia menjabat sebagai sekretaris, ia juga berkecimpung dalam organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan menjabat sebagai kepala bidang hukum dan HAM sejak 2012 sampai sekarang, selain itu, ia juga menjadi pengurus aktif pada organisasi Gerakan Mari Berbagi (GMB) sejak 2014 (Kamaruzzaman. 2019).

Pada 2016 ia bergabung dengan Pusat Studi *Atsiry Research Center (ARC)* Universitas Syiah Kuala dan saat ini ia menjabat sebagai kordinator divisi *community development* sejak 2017. Selain ARC, Suraiya juga bergabung dalam lembaga naungan Universitas Syiah Kuala lainnya seperti Pusat Studi *Aceh Climate Change Innitiative (ACCI)* sebagai kordinator divisi *knowledge management* pada 2016 dan saat ini ia bertugas sebagai ketua pelaksana pada lembaga tersebut.

Dimata rekan kerjanya di ACCI sebagai seorang pemimpin Suraiya cukup matang dalam menyampaikan sebuah pesan dengan bahasa yang diminati oleh orang-orang juga paham tentang permasalahan seseorang seperti masalah gender karena tidak semua orang memahami dan mau memperhatikan isu tersebut meskipun ia banyak terjun diberbagai aspek bukan hanya di gender seperti halnya di Pusat Riset Perubahan Iklim atau ACCI ini, beliau cukup bagus dalam

memanajemen waktu ditengah kesibukannya dan mudah berbaur dan mengajak seseorang bertumbuh dan berkembang bersamanya (wawancara, Monalisa 4 Juli 2022).

Kemudian, ia bergabung dengan *Center for Creative Industry of Syiah Kuala (CCIS)* sebagai deputy II, tim OVOP kerjasama USK-Pemko Banda Aceh sejak 2016 sampai sekarang, dan pada tahun 2017 ia bergabung dengan *Women Development Center (WDC)* dengan jabatan sebagai ketua pelaksana sampai 2019. Dengan keterbatasan waktu dan jam terbang yang sangat tinggi Suraiya tidak merasa terkendala dalam mengatur waktu saat bekerja, justru ia sudah terbiasa dan terlatih sehingga mampu mengetahui mana yang harus di kedepankan mana yang tidak dalam bekerja, ia merupakan sosok yang multitasking yang dapat melakukan pekerjaan dalam satu waktu. Tidak semua orang dapat bekerja seperti Suraiya hal tersebut perlunya kematangan dan ketekunan dalam melakukan segala hal, ia juga tidak segan untuk mengutarakan pendapatnya baik yang dirasa mengganggu atau tidak baginya, dan tindakannya tidak menjadikan orang di sekelilingnya merasa tersinggung karena penyampaian dan bahasa yang ia katakan santun dan rapih (wawancara, Monalisa 4 Juli 2022).

Selama meniti karir dalam bidang HAM dan lainnya, Suraiya memperoleh banyak penghargaan baik secara Nasional maupun Internasional. Adapun penghargaan yang diperoleh Suraiya antara lain; (1) Penghargaan Nasional Hak Asasi Manusia Yap Thian Hien Award Indonesia pada 2001, (2) *the Pixel Project* pada 2012 dengan kategori "*The 3rd Annual List of 16 Female Role Models Fighting to end Violence Against Women in Their Communities, from 14 Countries and 4 Continents*" *The Intent of This List is to Highlight The Good Work of The Heroines of The Movement to end Violence Against Women Wherever They are in The World*", (3) penghargaan "Anggota Terbaik I" Solidaritas perempuan *Bungoeng Jeumpa* Aceh tahun 2008-2009, (4) penghargaan Internasional Asia Pasifik mewakili Indonesia dalam N-PIACE award role model perdamaian yang diselenggarakan oleh UNDP tahun 2012, (5) penghargaan sebagai "Tokoh Peduli Perempuan" dari Walikota Banda Aceh yang

diselenggarakan Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Banda Aceh tahun 2012, (6) penghargaan *She Can Award* Indonesia sebuah apresiasi untuk wanita Indonesia dari *Tupperware* dengan kategori “Wanita Inspiratif *She Can*” tahun 2013, (7) penghargaan perempuan penggiat perdamaian pada April 2017 dari Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Indonesia, (8) penghargaan 72 ikon prestasi Indonesia pada Agustus 2017 yang diberikan oleh unit kerja presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), (9) pada 25 Desember 2021 ia memperoleh penghargaan dari Australia Aceh Award (AAA) dengan kategori penghargaan “Dampak Sosial” yang terdiri dari 30 alumni terbaik Australia dari Aceh telah dinominasikan dan di vote oleh 3000 pemilih, dan Suraiya berhasil memenangkan salah satunya (Hamdani. 2021).

Kiprah Suraiya Kamaruzzaman sebagai Aktivistis Perempuan HAM pada Masa Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tahun 1989-2004

Dalam menggerakkan perdamaian kontribusi Suraiya sebagai aktivis didukung dengan pendirian lembaga yang membesarkan namanya yaitu *Flower Aceh* dan Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) sebagai lembaga yang bergerak pada pemberdayaan perempuan, untuk memaparkan mengenai kedua lembaga tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Flower Aceh

Dalam proses menegakan HAM Suraiya mendirikan sebuah lembaga *Flower Aceh* dengan konsep komitmen anti kekerasan dan nilai kesetaraan gender. Sebagai kunci dan integritas dalam pendidikan-pendidikan di *Flower Aceh* yang ia dirikan, *Flower Aceh* memberikan warna baru dalam gerakan sosial di Aceh. Kekuatan *Motherhood* dan kekhasan perempuan Aceh yang tulus dalam setiap aksi-aksi sosialnya untuk menyuarakan ketidakadilan. Bahkan tidak jarang pendekatan dan strategi yang digunakan *Flower Aceh* tidak biasa.

Tidak menutup kemungkinan spekulasi yang muncul dianggap kurang tegas dan lembek Suraiya membentuk *Flower Aceh* saat kuliah

semester lima di Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. *Flower* menjadi organisasi pertama di Aceh yang independen serta memiliki afiliasi dengan jaringan nasional (Ariefana. 2018).

Flower Aceh memberi perhatian secara langsung maupun tidak langsung terhadap isu perempuan dengan memberikan pengorganisasian dan pendampingan psikis dan sosial kepada perempuan korban konflik. Sebagai salah satu organisasi yang berkontribusi *Flower Aceh* yang didirikan Suraiya pada tahun 1989, yayasan *Flower Aceh* merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang mengkonsentrasikan diri pada pemberdayaan perempuan yang berspektif gender.

Flower Aceh beranggotakan perempuan dan laki-laki yang memiliki kepedulian dan komitmen pada pembelaan dan penegakan hak-hak perempuan tertindas. *Flower Aceh* ikut membantu proses diskusi reguler dan training dengan fokus pada pengorganisasian, manajemen kelompok, gender dasar, hak perempuan, HAM dasar, teknik pendataan kasus pelanggaran HAM dan sistem pelaporan, kepemimpinan, hak politik perempuan, mikro kredit, dan lainnya.

Training yang dihadiri oleh kelompok perempuan dari kabupaten/kota yang ada di Aceh meliputi; Aceh Besar, Banda Aceh, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Utara, dan Bireun, sehingga pada bulan Juli 2000 lahirlah organisasi perempuan yang bernama SeIA yang beranggotakan ratusan perempuan yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Aceh. Adapun tujuan dari di dirikannya SeIA untuk memperkuat perjuangan hak-hak perempuan yang ikut bergabung termasuk upaya pengadaan beasiswa, sehingga anak-anak dari anggota SeIA yang menjadi korban akibat perekonomian yang hancur akibat konflik memperoleh akses untuk menempuh jenjang pendidikan (Sofyan, dkk. 2008).

Tujuan berdirinya *Flower Aceh* adalah mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, ada dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan anti kekerasan. Adapun tugas dan fungsi *Flower Aceh* antara lain; (1) memperkuat dan mendorong

perwujudan hak-hak dasar perempuan marginal dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya, (2) memperkuat partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerahnya, (3) mengembangkan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, (4) mengembangkan database kasus kekerasan terhadap perempuan dan database lain terkait kelembagaan, (5) melakukan advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak perempuan, (6) memperkuat kapasitas organisasi dan kelembagaan Flower Aceh, (7) bekerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga lain yang strategis mulai tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan, membela dan meningkatkan kesadaran hak asasi perempuan (Flower Aceh. 2021).

Suraiya mungkin terlambat menyadari adanya konflik di Aceh, hidup di masa konflik dan perang tidaklah mudah dimana keamanan, kekerasan, kematian menghantui disetiap gerak-geriknya, hak hidup sebagai manusia terancam. dan banyak korban yang bungkam karena terancam akan kehilangan nyawanya. Namun secara berani dan sigap bersama teman-teman seperjuangannya ia bukan hanya sebagai seorang mahasiswa melainkan pahlawan muda yang tergerak hatinya untuk membantu para perempuan korban konflik dan dengan berani menyuarkan hak perempuan Aceh di masa konflik sampai panggung PBB (Nayadini. 2017).

Suraiya yang terjun dan melihat langsung berbagai macam kondisi orang-orang yang ia tolong membuat dadanya sesak, setiap ia menceritakan kembali bagaimana pilunya keadaan pada saat itu dimana perempuan memperoleh kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan diperlakukan sebagai alat teror merasa teriris. Ia mungkin tidak menjadi korban namun berinteraksi dan berhadapan langsung dengan jangka waktu yang lama dengan para korban membuat ia mengalami gangguan kecemasan dan sakit secara psikologis (wawancara, Suraiya 13 Juli 2022).

Gangguan kecemasan tersebut membuat Suraiya tidak bisa hidup dengan nyaman dimana setiap malam merasakan kesulitan tidur, setiap ada gerak-gerik dan suara sekecil apapun di

malam hari terdengar olehnya. Sehingga suara tersebut menimbulkan perasaan was-was akibat trauma yang ia alami ketika mendengarkan cerita para korban dan melakukan pekerjaan tidak berjarak dengan situasi konflik tersebut.

Ketika Suraiya harus terjun langsung bersama mitra *Flower* ke desa-desa Suraiya memperoleh suatu peristiwa getir yang begitu membekas pada dirinya. Kejadian tersebut terjadi di desa wilayah Pidie basis daerah GAM. mengejutkan, raut wajahnya lesu, kusam memperlihatkan penuaan lebih cepat bahkan Suraiya sempat mengira bahwa anggotanya para orang tua namun ia akhirnya mengetahui bahwa orang-orang tersebut masih berusia muda sekitar 27 sampai 35 tahunan ketakutan, ancaman, terror, dan trauma itu berdampak pada kondisi fisik mereka (BBC. 2012).

Flower Aceh juga membantu korban konflik seperti kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnya Negara terhadap perempuan, pada kasus tersebut biasanya terjadi pada peristiwa yang isu sentralnya bukan ketidakadilan gender, melainkan aktor yang memainkan sudah aparaturnya negara. Kasus tersebut sering terjadi di ruang publik dan objek kekerasannya adalah perempuan sehingga kekerasan yang terjadi dengan bentuk spesifik gender.

Kasus kekerasan banyak terjadi pada saat diberlakukannya “Operasi Jaring Merah” di Aceh. Persoalan yang langsung menarik perhatian terhadap pelanggaran HAM adalah terjadinya penjarahan harta rakyat, penculikan, penganiayaan, pembakaran rumah tempat tinggal dan pembunuhan. Peristiwa tersebut membuat trauma dan berbekas dihati para korban dan seluruh kerabat yang menyaksikan hal tersebut di sekitaran wilayah Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur khususnya daerah-daerah istimewa yang ada di Aceh.

ditengah-tengah operasi militer yang sedang berlangsung, terjadi peristiwa-peristiwa yang sulit diterima oleh hati nurani manusia. Penyiksaan dan penjarahan terhadap “milik” perempuan yang sangat berharga, mulai dari intimidasi, pelecehan seksual dan pemerkosaan, teror hingga pembunuhan justru dilakukan oleh aparaturnya negara yang seharusnya memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap

masyarakat. Meskipun tidak dapat dipungkiri. Jika keberadaan GAM itu ada, namun yang menjadi persoalan ialah tidak adanya pengendalian sosial dari masyarakat yang ada di Indonesia khususnya di Aceh, kondisi tersebut mendorong berkembangnya pelanggaran HAM (Syahrir. 2000).

Selain kasus pelanggaran HAM pada aspek kekerasan fisik yang dilakukan Aparatur Negara. Flower Aceh membantu dan mendata para perempuan korban pelanggaran HAM pada aspek ekonomi dan politik, dimana perempuan dijadikan sebagai “alat teror”. Bentuk kekerasannya adalah penghancuran pada sektor ekonomi yang akibatnya sangat dirasakan oleh kaum perempuan. Contohnya, salah satu desa binaan Flower Aceh yaitu desa Dayah Baroeh, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie. Perempuan yang tergabung ke dalam kelompok dampingan tersebut mempunyai keahlian membuat tikar dari- pandan.

Menurut anggota kelompok tersebut, sebelum militer masuk ke desa mereka semua mempunyai usaha menganyam tikar yang hasilnya dapat membantu kehidupan dan biaya anak. Namun, keadaan tersebut berubah saat militer datang, semua tanaman pandan dibabat habis, akibatnya para pengrajin harus membeli bahan baku pandan ke tempat lain, hal itu mengakibatkan kerugian dan keuntungan yang didapat dari menjual tikar tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan.

Aspek lain yang berpengaruh dalam kehidupan yang sulit diabaikan ialah penghancuran adat istiadat dan budaya lokal serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Tidak ada lagi kepercayaan antar sesama masyarakat di pedesaan, sikap curiga muncul baik pada pendatang yang dicurigai sebagai seorang mata-mata, antar keluarga dan kerabat serta dalam bertetangga. Pemberlakuan DOM benar-benar telah merusak semua aspek kehidupan di Aceh, bahkan menjalar hingga ke akar sebuah etnis, budaya, suku-suku di Aceh.

Kekerasan lain yang marak terjadi pada masa konflik adalah kekerasan dalam rumah tangga. Laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sering diperoleh Flower Aceh, kekerasan tipe ini lebih sulit terdeteksi apabila

terjadi dalam *setting privat*, seperti yang dialami pekerja domestik (pekerja rumah tangga). Percobaan investigasi dan advokasi terhadap kasus dari tipe kekerasan seperti ini, maka selalu berbenturan dengan “hak privasi” tuan rumah. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi, perbudakan serta penyiksaan.

Untuk membuka ruang khusus bagi kaum perempuan menyuarakan “isi hatinya” terhadap perlakuan kekerasan yang dialami dan mendengar serta menyampaikan kembali aspirasi untuk kepentingan perempuan dalam membela HAM. Bagi perempuan korban DOM di Aceh diperlukan upaya pemulihan secara hukum, sosial dan individual. Hingga akhirnya terbentuk “Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan” membawa harapan baru bagi perempuan-perempuan Aceh untuk memperoleh hal-hal sebagai berikut; (1) mendata bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang dapat diakses oleh seluruh organisasi perempuan, (2) menyediakan *support system* untuk seluruh organisasi perempuan yang menangani kasus/korban kekerasan, (3) memberikan perlindungan kepada aktivis perempuan yang menangani kasus kekerasan serta mendampingi perempuan korban kekerasan, (4s) memberikan tekanan yang kuat, agar pemerintah menginterpretasikan kembali hukum-hukum yang tidak memberi perlindungan bagi perempuan untuk kemudian disesuaikan sehingga dapat melindungi perempuan diseluruh Indonesia.

Lembaga Flower Aceh dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan tidak memberikan bantuan dana kepada korban. Akan tetapi, hanya mendampingi korban hingga permasalahan yang di tangani tersebut selesai (Julia 2019: 63).

Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA)

Pada awal tahun 2000 saat Aceh masih dalam suasana konflik, Suraiya dengan 437 perempuan Aceh berkumpul untuk melaksanakan musyawarah yang disebut *Duek Pakat Inong Aceh* (DPIA). Kata “damai”, pertama kali muncul dalam Kongres Perempuan Aceh ini. Ditengah dorongan aktivis HAM dan aktivis GAM yang mengobarkan semangat referendum dan

merdeka. DPIA I dilaksanakan di Anjong Mon Mata Banda Aceh pada tanggal 19-22 Februari 2000 dan menghasilkan 22 buah rekomendasi. Fokus rekomendasi ditujukan untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelesaian konflik Aceh melalui dialog perdamaian.

Di tengah tekanan dan ancaman dari berbagai pihak baik dikenal atau tidak, panitia pelaksana/pengarah serta peserta tetap mempertahankan isu perdamaian menjadi sentral pertemuan. Diluar persoalan pro dan kontra dimulai dengan adanya sekitar 8-12 mahasiswi yang mewakili berbagai organisasi mahasiswa yang melakukan konferensi pers serta aksi demonstrasi menolak pelaksanaan DPIA karena dianggap tidak mewakili aspirasi mereka yang menginginkan referendum sebagai tema utama. Pro dan kontra semakin memuncak setelah menjelang keputusan besar di hari terakhir ada sekitar 20 peserta dan panitia *walk out* karena menginginkan penyelesaian konflik Aceh melalui referendum dengan pilihan merdeka dari Indonesia maupun tetap dari bagian Indonesia. Sedangkan peserta lainnya masih tetap menginginkan dialog damai sebagai upaya penyelesaian konflik (Sofyan, dkk. 2018: 142)

Pasca kongres, Suraiya menyampaikan seluruh hasil rekomendasi kongres Perempuan Aceh. Untuk menjalankan rekomendasi DPIA tersebut, maka dibentuklah Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA), yang memiliki kewenangan menterjemahkan rekomendasi DPIA ke dalam program kerja yang sesuai. Dalam kongres perempuan Aceh pertama itu, ia terlibat dalam penyusunan draft dan advokasi Rencana Aksi Nasional PBB 1325 yang telah disahkan melalui Pelpres No. 18 tahun 2014. Dan ditingkat lokal ia juga terlibat dalam penyusunan draft Piagam Hak Perempuan Aceh dan advokasi qanun, serta Peraturan Bupati/Gubernur untuk peraturan SPM dalam pelayanan hak perempuan dan anak korban kekerasan. Suraiya juga menawarkan partisipasi perempuan di berbagai media (Wea. 2021).

Lima tahun pasca kongres DPIA I, ketika kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM di tanda tangani di Helsinki, Finlandia, diantara lima tim negosiator resmi yang mewakilkan kedua belah pihak perempuan tidak satupun dilibatkan. Akibatnya, permasalahan

perempuan di wilayah konflik terlupakan dari topik penting yang didiskusikan dan tidak menjadi bagian dari kesepakatan dalam MOU perdamaian. DPIA II, dilaksanakan di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam Banda Aceh, pada tanggal 18-20 Juli 2005.

Sesuai dengan situasi dan kondisi Aceh pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami, DPIA II melahirkan 36 rekomendasi yang mendorong dipenuhinya hak-hak perempuan dan anak korban bencana dan dilibatkannya perempuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh yang berperspektif gender (Balai Syura Ureung Inong Aceh. 2022: 3).

Kiprah Suraiya Kamaruzzaman sebagai Aktivis Perempuan HAM Pasca Tsunami Aceh Tahun 2004

Setelah setahun pasca tsunami keadaan perempuan Aceh cukup mengkhawatirkan, perempuan Aceh dituding sebagai penyebab kerusakan moral pada masyarakat dengan anggapan bahwa sering dijumpai perempuan bersama pasangannya menghabiskan waktu malam minggu di sekitar pesisir pantai Banda Aceh untuk bersukaria, bersantai, pesta musik, bahkan sampai ke tahap mabuk-mabukan. Jadi, yang pertama di sorot adalah perempuan bukan laki-laki.

Banyaknya perempuan yang menjadi korban bencana alam tsunami menyebabkan banyaknya laki-laki/duda di Aceh. Laki-laki ini berusaha berperan menjadi sosok baru baik dalam pekerjaan mencari nafkah dan pekerjaan mengurus anak, atau mereka mencoba mencari perempuan lain untuk melaksanakan pekerjaan gender tradisional ini, dalam rangka hidup bahagia dan membangun masa depan.

Kaum perempuan pun mencoba untuk menyesuaikan diri dengan peran baru seperti mereka mengerjakan yang lebih baik untuk kebutuhan rumah tangga. Perubahan dalam peran-peran gender tersebut terkadang dapat menjadi sesuatu yang menyusahkan kaum laki-laki. Beberapa laki-laki/duda meminta keluarga perempuan untuk mengurus anak-anaknya dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Selain meminta bantuan kepada saudara perempuan, terkadang para duda tersebut mempekerjakan

asisten rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan domestik mereka, seperti menjaga anak, mencuci pakaian, memasak, ataupun pekerjaan rumah lainnya (Sofyan, dkk. 2008).

Setelah dua tahun pasca tsunami, hak-hak perempuan di Aceh masih belum terpenuhi. Sejak awal perumusan pembangunan, ketika *blue print* untuk rekonstruksi dan pemulihan disusun hingga pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), peran perempuan tidak dilibatkan. Hal tersebut mencerminkan budaya lokal dimana perempuan jarang dilibatkan dalam peristiwa-peristiwa penting seperti proses pengambilan keputusan pada rapat kampung. Anggapan umum bahwa diberbagai aspek suara perempuan sudah di wakikan oleh laki-laki sebagai kepala keluarga, tidak mudah bagi perempuan mendapatkan ruang penting dalam tatanan kehidupan tersebut. Namun, bukan berarti tidak ada peluang sama sekali perempuan memperoleh hak dan suaranya hanya saja peluang kesempatannya sangatlah kecil.

Bekerjasama dengan NGO dan organisasi lainnya yang bekerja untuk isu hak-hak perempuan, perempuan melakukan pendidikan penyadaran hak-haknya, sosialisasi hak-hak perempuan di kemah pengungsian, mengkritisi kebijakan agar mempertimbangkan kepentingan perempuan dan lain-lain. Upaya lainnya ialah ikut terlibat dalam berbagai pertemuan yang membahas persoalan pembangunan di Aceh dengan memasukan perspektif perempuan.

Meskipun tidak mudah, mengingat ketika wacana “memasukan perspektif perempuan” dalam tingkat operasional program tidak banyak perempuan yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, sering sekali sebelum ikut dan berperan aktif dalam sebuah pertemuan yang diikuti semua pihak, perempuan harus merancang pertemuan khusus antara sesama perempuan terlebih dahulu, untuk memastikan semuanya memperoleh informasi yang sama, memahami isu dan tahu strategi pendekatan yang tepat.

Keikutsertaan Suraiya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan pasca tsunami dengan ikut serta melaksanakan agenda besar dan monumental yang dilakukan

perempuan dengan melaksanakan kongres perempuan Aceh yang kedua (DPIA II), yang dilaksanakan pada 16 sampai 19 Juni 2005 yang dihadiri sekitar 400 perempuan berbagai kalangan profesi, suku dan agama. Pertemuan tersebut dimulai dengan pelaksanaan seminar selama sehari dengan pemateri salah satunya adalah Direktur BRR yang diwakili Deputy bidang sosial budaya agama, perempuan dan anak dengan tema seminar “Pemulihan dalam Makna Luas Bagi Perempuan Serta Keterlibatan dalam *Recovery* dan Rekonstruksi Aceh” (Sofyan, dkk. 2008).

Kiprah Suraiya Kamaruzzaman sebagai Aktivistis Perempuan HAM pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022

Wabah *Corona Virus Disease* tahun 2019 atau Covid-19 membuat geger masyarakat diseluruh dunia. Pasalnya, wabah tersebut memberikan dampak buruk diberbagai sendi kehidupan manusia baik ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Akhir tahun 2019 sampai awal 2020, berita corona masih menjadi isu manca negara. Namun, tak disangka wabah ini akhirnya masuk ke Indonesia hingga menimbulkan ratusan nyawa melayang akibat paru-paru yang di gerogoti virus yang berasal dari Kota Wuhan, China. Bahkan anggota medis seperti dokter, perawat, menjadi korban keganasan pandemi ini. Pada tahun 2020, perhatian terhadap covid-19 lebih di pusatkan bagi bangsa Indonesia, banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi yang memiliki dampak pada perekonomian di Indonesia.

Pada masa pandemi perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, dimana perempuan mendapat pukulan sangat berat. Aceh sebagai daerah pasca konflik yang belum pulih sepenuhnya harus menghadapi pandemi Covid-19 memperparah dampak bagi perempuan, Suraiya dalam mengkampanyekan pemberdayaan dan perlindungan perempuan pada masa pandemi aktif menjadi pembicara maupun bergerak menyelenggarakan seminar-seminar secara *online*. Salah satu webinar dimana Suraiya menjadi narasumber yang bertema “Perempuan, Pandemi dan Perubahan Sosial di wilayah Pasca Konflik” yang diselenggarakan Pusat Studi

Keamanan dan Perdamaian UGM. Arifah Rachmawati seorang peneliti senior PSKP UGM berpendapat:

“Pandemi Covid-19 mempersulit perempuan eks pejuang di Aceh. Menurutnya, bukan saja soal pandemi, mereka juga belum selesai dengan masalah konflik masa lalu. Sehingga pandemi ini menambah persoalan di daerah pasca konflik semakin berlapis-lapis, perempuan eks pejuang konflik masih tidak percaya adanya bahaya yang mengancam selama pandemi, bagi perempuan pejuang Aceh ancaman merupakan suatu situasi dimana mereka berhadapan dengan peristiwa pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan lain-lain, makanya mereka tidak percaya akan adanya ancaman Covid-19 karena Covid-19 bukan ancaman yang nyata” (Nugroho. 2020).

Di masa pandemi Suraiya tetap bekerja hanya saja saat ini ia sudah tidak lagi terjun dalam penanganan kasus secara langsung melainkan fokus terhadap advokasi mulai dari sosialisasi pencegahan kekerasan sampai advokasi kebijakan-kebijakan. Selama pandemi ia bekerja sama seperti dengan AMAN (Asian Muslim Action Network) tingkat nasional untuk melakukan review Rancangan Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RANP3AS) selama beberapa bulan dan ia menjadi fasilitatornya di *platform digital* sampai hasil review tersebut digunakan untuk advokasi RANP3AS yang baru yang sudah disahkan. Kemudian, kami melakukan advokasi untuk provinsi ada beberapa kali workshop secara *offline* dengan menggunakan protokol kesehatan ada juga pertemuan-pertemuan secara *online*.

Sekarang Banda Aceh sudah memiliki Rancangan Aksi Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RADP3AS) itu dilakukan selama pandemi dan dokumennya sudah di sahkan menjadi peraturan gubernur, dengan begitu berarti advokasi tersebut sudah berhasil, kedepannya ia akan melaksanakan worksop di Pade pada tanggal 15-16 Juli 2022 terkait penguatan calon tim RADP3AS itu. Selain itu ia juga melakukan advokasi terhadap RADPE sebelumnya mencoba melihat dari RANPE dalam

perspektif gender itu bersama AMAN juga lalu di Aceh BSUIA memegang aksi daerah untuk Pencegahan Aksi Terorisme Yang Berspektif Gender, itu juga di pegang oleh BSUIA bekerjasama dengan KESBANGPOL dan FKPB Aceh itu sudah keluar SK TIM nya dan dilakukan selama pandemi, kemudian secara regular terus melakukan proses sosialisasi pencegahan kekerasan dan ikut terlibat dalam kampanye (wawancara, Suraiya 13 Juli 2022).

KESIMPULAN

Suraiya merupakan aktivis perempuan pejuang HAM di Aceh yang memiliki peranan penting dalam membantu perempuan Aceh dalam memperoleh hak-haknya pada masa konflik, tsunami sampai saat ini. Ia layak dikatakan sebagai pejuang perempuan Aceh di era modern sehingga hasil dari kerja keras dan semangatnya berhasil membawa Suraiya dalam meraih prestasi dan penghargaan. Keberhasilan Suraiya Kamaruzzaman menjadi aktivis perempuan pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dari Aceh, tidak lepas dari latar belakang dan dukungan keluarga dan kerabatnya selama ia membantu para perempuan korban konflik. Ia tidak lahir dari keluarga yang berkecimpung pada *social human right* kedua orang tuanya hanya seorang guru, namun tekad dan semangat keberanian yang diwarisi Suraiya berasal dari nama besar kakeknya Tengku Abdullah Abu Lam U sebagai ulama kharismatik Aceh.

Sebagai perempuan pemberani yang berada di garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Aceh latar belakang sosial, budaya dan politik di Aceh yang tidak stabil juga salah satu pendorong Suraiya tergugah hatinya untuk terjun dalam ranah kemanusiaan dan menolong sesama perempuan.

Perjalanan karirnya dimulai sejak ia semester lima di perkuliahan, awalnya ia hanya mahasiswa biasa yang sedang mencari pengalaman dan wawasan berorganisasi hingga akhirnya ia mendirikan *Flower Aceh* lembaga yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Selain *Flower Aceh*, Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) juga lembaga yang ia dirikan bersama teman-temannya setelah pelaksanaan *duék pakat inong Aceh* atau kongres perempuan Aceh yang pertama.

BSUIA itu sendiri memiliki tujuan memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Selama menekuni dunia aktivis banyak kalangan yang tertarik dan memberikan bantuan beasiswa terhadap Suraiya agar lebih mendalami HAM. Hingga pada tahun 2002 ia mengambil beasiswa *Asia Foundation* di Hongkong dengan jurusan *Human Right* membuat profesionalitas Suraiya tentang HAM semakin meningkat dan diakui oleh banyak kalangan.

Perjuangan Suraiya menjadi aktivis tidak berhenti sejak konflik dan pasca tsunami saja. Pada masa pandemi ia aktif menjadi pembicara dalam seminar perempuan baik secara *online* ataupun *offline*. Perang mungkin telah selesai, namun semangat melindungi kaum perempuan tetap dikampanyekan oleh Suraiya. Namanya dikenal bukan hanya di Aceh atau Indonesia saja akan tetapi sampai Internasional, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat biografi Suraiya Kamaruzzaman sebagai aktivis HAM dari Aceh agar namanya dapat diabadikan dan dikenang.

SARAN

Penelitian memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait agar dapat mempertimbangkan untuk kedepannya terkait permasalahan yang terjadi yaitu; (1) kepada pemerintah Aceh, meskipun konflik, tsunami dan pandemi Covid-19 sudah berlalu namun perhatian terhadap permasalahan-permasalahan mengenai isu tentang kekerasan yang dialami kaum perempuan, baik di ranah keluarga, pekerjaan ataupun pendidikan harus lebih dikedepankan, dan tetap melibatkan perempuan dalam kondisi apapun, (2) kepada Masyarakat agar lebih terbuka, konflik, bencana tsunami, dan pandemi Covid-19 mungkin sudah berlalu, namun kesadaran dan kehati-hatian akan kekerasan dan pelecehan seksual kapan saja dapat terjadi bahkan dilingkungan keluarga sekalipun, kita harus bangga bahwa ada sosok perempuan berani dari Aceh di era modern sehingga dapat menjadi suri tauladan bagi generasi muda untuk memperjuangkan hak-hak perempuan ataupun HAM bagi kehidupan mereka, (3) kepada Peneliti selanjutnya, penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan serta jauh dari kata

sempurna. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mencari sumber lebih luas dan mendalam lagi, terutama sumber-sumber primer agar terhindar dari kesalahan penulisan sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguswandi, & Large, J. (2008). *Accord Suatu Riview Internasional untuk Inisiatif Perdamaian Rekonfigurasi Politik: Proses Perdamaian Aceh*. London: Conciliation Resource.
- Ariefana, P. (2018). *Suraiya Kamaruzzaman Perempuan Jadi Agen Perdamaian Konflik*. Artikel. <http://www.suara.com/wawancara/2018/02/05/070000/suraiya-a-kamaruzzaman-perempuan-di-balik-perdamaian-konflik>. Diakses 15/8/2022.
- BBC. (2012). *Suraiya Memberdayakan Perempuan Aceh*. Artikel. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/11/121102tokoh_oktober2012_suraiya_kamaruzzaman. Diakses 14/2/2022.
- Daud, S. (2013). Antara biografi dan historiografi (studi 36 buku biografi di Indonesia). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 243-270.
- Detik. (2012). *Suraiya Kamaruzzaman Aktivist Anti-KDRT Sabet Penghargaan Perdamaian UNDP*. Artikel. <https://news.detik.com/tokoh/d-2058203/suraiya-kamaruzzaman-aktivis-anti-kdrt-sabet-penghargaan-perdamaian-undp>. Diakses 14/2/2022.
- Flower Aceh. (2022). *Profil Lembaga Perkumpulan Flower Aceh*. Banda Aceh: Flower Aceh.
- Hamdani. (2021). *Rahmadhani Raih Aceh Australian Alumni Awards 2021 Kategori Penghargaan Profesional Pemerintahan*. Artikel. <https://retizen.republika.co.id/posts/22273/rahmadhani-raih-aceh-australian-alumni-awards-2021-kategori-penghargaan-profesional-pemerintahan>. Diakses 21/3/2022.

- Indraswari, D., & Kholifah, R. (2016). *Mutiara Terpendam Kisah Heroik Perempuan Pelopor Perdamaian*. Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP).
- Julia. I. (2019). Peran Flower Aceh dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Masyarakat Aceh. *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Kamaruzzaman. S. (2019). *Curriculum Vitae*. Banda Aceh: Balai Syura Ureung Inong Aceh.
- Kupipedia. (2021). *Suraiya Kamaruzzaman*. Artikel.https://kupipedia.id/index.php/Suraiya_Kamaruzzaman. Diakses 15/8/2022.
- Murni, dkk. (2018). *Sejarah Terwujudnya Damai Aceh & Proses Reintegrasi Aceh (Aceh & Jalan Panjang Menuju Damai)*. Banda Aceh: Badan Reintegrasi Aceh.
- Nayadini. (2017). *Dari Kampung Hingga Panggung PBB*. Dalam *Scarf Modest Fashion Magazine*. (64): 20.
- Nugroho, A. (2020). *Pandemi Menjadikan Perempuan di Daerah Konflik Menghadapi Persoalan Berlapis*. Artikel. https://sahabat.ugm.ac.id/fo/berita/detail_berita/9idf0l9dqoxhxskm92yj3pxkgv4zpk0fcdpifkltx-cnwg-a1hfwjlxzyyhv8gyqe4mmb5ouoloafqpdjqidpdvcsdgnispvs1nw0ec0ue84wtpbeyeihmv90joifmpdpvaqak9zpqrlorabosfn4dgpqz68g7m1ncyi-wmqkjgtmpehxygqgbmkdfgbphnu3wnsqmvviu8w5keicalxw==/. Diakses 1/7/2022.
- Sofyan, dkk. (2008). *Perempuan Aceh Bicara*. Bangkok: UNIFEM.
- Sufi, dkk. (1998). *Keanekaragaman Suku dan budaya di Aceh*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Syahril, K. (2000). *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).
- Wea. (2021). *Melaksanakan Kampanye Lokal dan Internasional untuk Pemberdayaan Perempuan Sebagai Pemimpin Konservasi di Aceh*. Artikel.<https://womensearthalliance.org/surainya-kamaruzzaman/>. diakses 15/8/2022.